

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENERBITAN  
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN PADA  
CV. ROSALIA INDAH DI TEMBILAHAN**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**R. HERMAWAN  
NIM. 11427103798**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1441 H/2020 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENERBITAN  
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN PADA  
CV. ROSALIA INDAH DI TEMBILAHAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh**

**R. HERMAWAN  
NIM. 11427103798**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1441 H/2020 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Muslim, S.Ag. SH., M.Hum

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN PADA CV. ROSALIA INDAH DI TEMBILAHAN.**

Yang ditulis oleh:

Nama : R. HERMAWAN

NIM : 11427103798

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2019

Pembimbing Skripsi



Muslim, S.Ag. SH., M.Hum



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN PADA CV. ROSALIA INDAH DI TEMBILAHAN**, yang ditulis oleh :

Nama : **R. Hermawan**  
NIM : 11427103798  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 06 Januari 2020  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2020

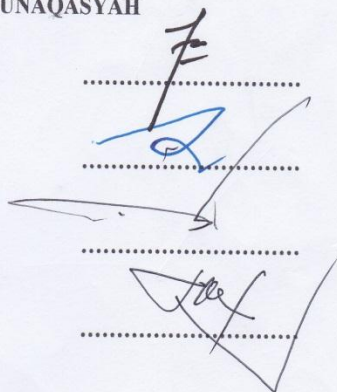
#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

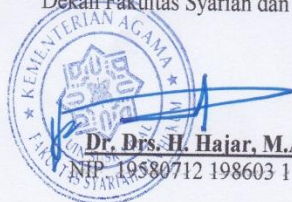
Sekretaris  
**Hellen Last Fitriani, SH., MH**

Penguji I  
**Nur Hidayat, SH., MH**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

## ABSTRAK

**R. Hermawan (2019): Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada CV. Rosalia Indah Di Tembilahan.**

Penelitian ini dilaksanakan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bahwasanya setiap usaha wajib mendaftarkan usahanya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta menjalankan usahanya sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), namun di CV.ROSALIA INDAH menjalankan usaha tidak sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Pada CV. Rosalia Indah di Tembilahan serta untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada CV. Rosalia Indah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri telah mengimplementasikan pasal tersebut di atas dengan cukup baik melalui Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir serta dibantu oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir. selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pimpinan CV. Rosalia Indah, Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir telah memberikan surat peringatan terhadap kesalahan yang di lakukan oleh CV. Rosalia Indah, dan CV. Rosalia Indah akan segera menutup usaha Furniture yang mereka jalankan agar SIUP perusahaan mereka tidak dicabut oleh Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN PADA CV. ROSALIA INDAH DI TEMBILAHAN”**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga banyak mendapat bantuan, saran serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Raja Ahmad dan Ibunda Masitah yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukunga moril maupun materil serta do'a.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. selaku rektor UIN SUSKA RIAU beserta stafnya yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas yang dipimpinnya.
  3. Bapak Dr. Hajar, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
  4. Bapak Firdaus, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak Muslim, S.Ag, SH, M.HUM selaku pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahannya serta petunjuk dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
  7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis
  8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini
10. Bapak Helmi, Ibu April Linda Purwanti, dan Ibu Susi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir yang telah menerima dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta pihak-pihak lain yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam pengumpulan data.
11. Ibu Eva Rosalinda, Ibu Marlia, Ibu dewi, Ibu Ana, di CV. ROSALIA INDAH yang telah menerima dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta pihak-pihak lain yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam pengumpulan data.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan, pendapat, informasi dan dorongan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Buat Sahabat RR Squad, Andy Dwi Novriadi, M. Afif Ariandi. SH, Dede Chairuman, Fauzan, Muhammad Rizky, Syarifah Soraya, dan Syarifah Azareha, yang selalu meluangkan waktu untuk menghibur penulis sehingga penulis tidak jenuh dalam penulisan skripsi ini.
14. Buat Sahabat Ghibah Squad Rohmatul Syahdi, Rahmi Nurhayati. SH, Indah Ratnasari, Jumiati Fitri, Jalal, Nolla Polwanti dan Suci Febriani yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu meluangkan waktu untuk menghibur penulis sehingga penulis tidak jenuh dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pekanbaru, November 2019

Penulis

**R. Hermawan**

**NIM. 11427103798**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kota Tembilahan .....	16
B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	23
C. CV. Rosalia Indah .....	26
<b>BAB III TINJAUAN YURIDIS</b>	
A. Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) .....	29
B. Dasar Hukum Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) .....	31
C. Jenis-jenis Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) .....	32
D. Manfaat dan Tujuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) .....	34
E. Syarat-syarat Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) .....	35
F. Prosedur Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) .....	38
G. Sanksi .....	39

## BAB IV

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak cipta milik UIN Suska Riau

## BAB V

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## HASIL PENELITIAN

- A. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada CV. Rosalia Indah Di Tembilahan..... 42
- B. Apa sanksi yang diberikan kepada CV.Rosalia Indah, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ..... 48

## PENUTUP

- A. Kesimpulan ..... 54
- B. Saran..... 55



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari berbagai negara, begitu pun Indonesia, dalam alinea ke- 4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan kesejahteraan umum, kesejahteraan bersamamenghindari ketimpangan kesejahteraan yang jauh.<sup>1</sup> Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga terpenuhinya kebutuhan hidup yang dapat mengembangkan diri dan melaksanakan fungsi sosial yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan langkah-langkah untuk memulihkan perekonomian nasional melalui serangkaian kebijakan di berbagai sektor. Pemerintah menggaris bawahi arti penting sektor perdagangan di tengah krisis perekonomian global yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.<sup>2</sup> Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbagai upaya dan kajian dilakukan, pemerintah dan para ilmuwan mencari solusi atas masalah kesejahteraan yang belum menjangkau lapisan masyarakat, kajian dari berbagai prespektif dilakukan, ada banyak faktor untuk meningkatkan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-4.  
<sup>2</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/75037-ID-kefektifan-pemberlakuan-surat-ijin-usaha>, diakses pada tanggal 04 November 2019.

kesejahteraan diantaranya adalah kemandirian masyarakat untuk mengupayakan kesejahteraannya dengan menjadi wirausaha dan meningkatkan iklim investasi.

Untuk meningkatkan wirausaha dan iklim investasi, pemerintah hendaknya memberi kemudahan atau member apresiasi kepada seorang yang ingin berusaha dalam satu bidang tertentu. Memberi kemudahan didalam perizinan dan pengelolaannya agar pelaku usaha menjalankan usaha nya berjalan dengan aturan yang berlaku.

Pada zaman modern ini, perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membeli dan menjual barang-barang yang memudahkan dalam memajukan pembelian dan penjualan itu. Perniagaan atau perdagangan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha.<sup>3</sup>

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang tinggi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, begitu juga di dalam sektor perdagangan. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut diperlukan adanya kerjasama yang solid antara pemerintah dengan para pengusaha swasta lokal maupun swasta non lokal. Pemerintah dengan para pengusaha tersebut harus saling mendukung, kondisi ini akan sangat mendukung terwujudnya

---

<sup>3</sup>Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan perekonomian khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Bentuk perhatian ataupun dukungan dari pemerintah selaku pemberi dan pembuat kebijakan adalah pemberian kemudahan mendirikan perusahaan, memberikan keringanan dalam penetapan besarnya pajak, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan usaha dan sebagainya. Sehingga akan memberikan peluang terhadap para pengusaha untuk mendirikan suatu perusahaan.<sup>4</sup>

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah mendaftarkan perusahaan di kantor perdagangan guna memperoleh izin untuk melakukan usaha. Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya daftar perusahaan yang memerlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Keuntungan dari kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pengusaha juga dapat dirasakan oleh pemerintah daerah, yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak serta restribusi dari para pengusaha yang mendirikan usaha. Dan keuntungan yang dirasakan para pengusaha, yaitu para

---

<sup>4</sup> <https://eprints.uns.ac.id/6366/1/Unlock-190851611201103501.pdf>, diakses pada tanggal 04 November 2019.



pengusaha bisa melakukan kegiatan usaha secara aman karena sudah dilindungi oleh hukum dan sistem pemerintah daerah yang baik, selain itu pengusaha juga mendapatkan laba dari usahanya tersebut. Dengan demikian, apabila kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha bisa terselenggara dengan baik, maka kebutuhan masyarakat akan tercukupi dengan baik dan mudah didapatkan, tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat, memberikan peluang usaha bagi masyarakat, membuka kesempatan kerja yang luas dan akhirnya akan memberikan dampak positif pula bagi pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah sebagai alat administrasi negara adalah membentuk ketetapan atau keputusan. Bentuk ketetapan atau keputusan yang berkaitan dengan perdagangan adalah berupa perizinan. Di dalam suatu perusahaan dagang, salah satu kewajiban para pelaku usaha adalah harus mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat Izin Usaha Perdagangan wajib dimiliki oleh para pelaku usaha perdagangan karena sebagai bukti legalitas atas perusahaannya dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Dengan adanya SIUP ini para pengusaha akan lebih lega dan tenang dalam menjalankan usahanya karena sudah dilindungi oleh hukum dan sudah diakui oleh pemerintah. SIUP dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi dari suatu perusahaan perdagangan baik mengenai identitas pendirinya, jenis usahanya, ruang lingkup kegiatannya dan tempat pendirian perusahaannya. Dengan adanya SIUP tersebut akan dapat didata dan dinilai oleh pemerintah mengenai pertumbuhan perekonomian daerahnya serta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempermudah pemerintah dalam mengawasi, memberi pengarah, bimbingan dan lain-lain. Kewajiban suatu perusahaan untuk mendapatkan SIUP didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Bagi dunia usaha, daftar perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan, dan sebagainya). Sebagaimana telah dijelaskan salah satu tujuan utama daftar perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur.<sup>5</sup> Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas adalah jatidiri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Ada beberapa jatidiri yang melegalkan badan usaha yaitu Nama Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Wajib Daftar Perusahaan.<sup>6</sup>

Izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan. bagi pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

Sembiring Sentosa. *Hukum Dagang*, (Bandung:PT.citraaditya Bakti, 2015), hlm. 110.  
Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 81.

lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.<sup>7</sup>

Di Kota Tembilahan terdapat usaha dagang yang bernama CV. Rosalia Indah yang bergerak dibidang perdagangan material bangunan seperti semen, kawat, besi dan lain-lain yang telah memperoleh izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan usaha tersebut. Namun, selain material bangunan diatas ternyata CV. Rosalia Indah juga memperdagangkan material rumah tangga atau furniture yang telah berjalan selama bertahun-tahun yang modal dan keuntungannya telah sesuai untuk diproses perizinan.

Dalam hal ini Rosalia Indah, terlebih dahulu menjalankan usahanya sebelum adanya usaha lain. Didalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdapat hanya usaha semen saja yang telah mendapatkan izin dan telah didaftarkan. Sedangkan didalam praktiknya Rosalia Indah, menjalankan usaha dibidang lain yang tidak didaftarkan atau tidak adanya izin berusaha yaitu dibidang furniture yang telah berjalan selama bertahun-tahun.

Hal ini telah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi *“SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP.”*

---

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9 .Tentang penerbitan Izin Usaha(Jakarta, 2009).



Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN PADA CV. ROSALIA INDAH DI TEMBILAHAN”**

#### B. Batasan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang dikaji agar tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian maka penulis hanya mengkhususkan pembahasan ini pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi *“SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP.”*

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:

Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada CV. Rosalia Indah Di Tembilahan?

Apa Sanksi yang Diberikan Kepada CV. Rosalia Indah, Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada CV. Rosalia Indah Di Tembilahan.
- b. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada CV. Rosalia Indah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

### Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara sistematis dan rasional dalam meneliti permasalahan terkait pelaksanaan perizinan oleh perusahaan tersebut dan memberikan wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca terhadap pentingnya mendaftarkan perusahaan dan menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diperoleh dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi setiap orang yang hendak melakukan suatu usaha dengan mendaftarkan perusahaan tersebut agar memperoleh izin dan menjalankan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Dilarang Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisa penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian Hukum Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.<sup>8</sup> Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau obojek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya. Serta menghubungkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha. Tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “*SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP.*”

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena disana terdapat usaha dagang yang tidak memiliki izin usaha.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Rajawali Pers, 2014), hlm. 31





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian lapangan dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan data yang diteliti. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh langsung dari kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan ketua CV. Rosalia Indah.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka misalnya buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian.<sup>10</sup> Data sekunder dapat diperoleh melalui bahan hukum sebagai berikut :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:AlfaBeta, 2017), hlm. 225.  
<sup>11</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta memiliki hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penelitian, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>11</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

### a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah dimana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti di Kawasa Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Proses berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat dan mencatat kejadian.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), cetakan ke-8, hlm. 13.

<sup>12</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 180.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu di kawasan kota tembilahan kabupaten Indragiri Hilir dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk *diagnose* dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>13</sup>

#### c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan teori-teori yang mendukung dan menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Informasi diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### 5. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau objek penelitian.<sup>14</sup> Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>15</sup> Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang melakukan survei lapangan.

<sup>13</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.95.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 79.

<sup>15</sup> *Ibid.*



Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf dan anggota di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh karyawan CV. Rosalia Indah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki cirri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini adalah:

**Tabel I**

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PERSEN
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan	1 orang	1 orang	100%
2	Staf (humas) Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan	2 orang	1 orang	50%
3	Pimpinan CV. Rosalia Indah	1 orang	1 orang	100%
5	Karyawan CV. Rosalia Indah	6 orang	3 orang	50%
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>60%</b>

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta:PT. Rinneka Cipta, 1983), hlm. 65

c. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>17</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

**BAB I :PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kota Tembilahan dan CV. Rosalia Indah yang terdiri dari sejarah berdirinya dan perkembangannya.

**BAB III :TINJAUAN YURIDIS**

Pada bab ini menguraikan tentang kajian kepustakaan antara lain : Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar hukum Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), subjek dan objek penelitian, sebab akibat melakukan usaha tidak sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

**BAB IV****:PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada CV. Rosalia Indah Di Tembilahan.

**BAB V****:PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Tembilahan

Tembilahan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kecamatan Tembilahan memiliki luas wilayah 197,37 km<sup>2</sup>, terdiri dari 6 kelurahan. Tembilahan juga merupakan ibu kota kabupaten. Jumlah penduduk Kecamatan Tembilahan tahun 2010 adalah 69.498 jiwa.

#### 1. Geografis dan Iklim Kota Tembilahan

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 Km<sup>2</sup> atau 19.737 Ha. Kecamatan Tembilahan terdiri dari delapan kelurahan dimana kelurahan yang mempunyai wilayah terluas adalah Kelurahan Sungai Perak mencapai 58,57 kilometer persegi atau sekitar 29,67 persen dari luas keseluruhan Kecamatan Tembilahan.

Secara Geografis Kecamatan Tembilahan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Batang Tuaka;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok;
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Batang Tuaka

Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Di wilayah pengamatan Tembilahan, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November 2018 yaitu 353 mm dan terendah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada bulan Juni 2018 yaitu 54 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan yaitu bulan Maret dan November 2018 yaitu masing-masing sebanyak 21 hari dan terendah terjadi pada bulan Agustus 2018 sebanyak 5 hari. Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Keadaan tanahnya sebagian besar berupa daerah tanah gambut, endapan sungai dan rawa-rawa.

## 2. Sosial

### a. Pendidikan

Kecamatan Tembilahan memiliki 68 sarana pendidikan yang tersebar di 8 Kelurahan, terdiri atas 43 Sekolah Dasar (SD)/Sederajat, 14 Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat, dan 11 Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat. Selain itu pada jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdapat 3 Taman Penitipan Anak, 23 Kelompok Bermain, 15 Taman Kanak-kanak, dan 7 Raudhatul Athfal.

### b. Kesehatan

Terdapat dua buah Puskesmas di Kecamatan Tembilahan yang terletak di Kelurahan Tembilahan Hilir dan Kelurahan Tembilahan Kota yang merupakan sarana kesehatan andalan masyarakat Kecamatan Tembilahan, dimana pada tahun 2017 di Puskesmas Gajah Mada terdapat 19.086 kunjungan pasien. Selain juga terdapat 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada yang terletak di Kelurahan Tembilahan Hilir.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### c. Agama

Mayoritas penduduk Kecamatan Tembilahan adalah beragama Islam dimana terdapat 51 Masjid dan 79 Surau/Mushola. Pada Tahun 2017 tercatat jumlah nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan sebanyak 671 dengan tertinggi terjadi di bulan September yakni sebanyak 115.

### 3. Ekonomi

#### a. Pertanian

Indragiri Hilir akan memberikan pelayanan terbaik yang diperlukan oleh calon penanam modal itu. Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah dan letak geografis yang sangat strategis, Indragiri Hilir terus memacu diri mengembangkan kawasannya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Riau dan pusat pertumbuhan kebudayaan ekonomi Riau dan Pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara.

Sebagai Kabupaten tumbuh dan berkembang pada gerbang selatan provinsi Riau yang bersebelah dan menjadi *hinterland* Malaysia dan Singapura, serta selangkah dari pusat pertumbuhan Batam dan Bintan, masuknya investor. Potensi sumber daya alam Indragiri Hilir harus dikelola industri-industri hilir yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. Untuk itu pemerintah Kabupaten harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna memudahkan hadirnya para investor lokal, regional bahkan internasional.

Pemerintah Indragiri. Salah satu diantaranya adalah memberikan pelayanan terpadu satu pintu yang di kenal sebagai *One Door Service*.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan *One Door Service* calon investor akan mendapat pelayanan memuaskan, sejak dari informasi peluang bisnis. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam serta menyimpan berbagai potensi ekonomi, Indragiri Hilir menjanjikan banyak kemungkinan pada masa depan. Didukung letak geografis yang strategis serta ditunjang tersedianya berbagai infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang positif daerah ini merupakan lahan investasi yang layak diperhitungkan dalam era ekonomi global.

Untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan mempermudah investasi, pemerintah daerah telah membangun berbagai infrastruktur terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Potensi lahan basah (pasang surut) untuk persawahan di Kabupaten Indragiri Hilir seluas  $\pm 57.642$  ha, yang belum dimanfaatkan seluas  $\pm 23.965$  ha dan yang sudah dimanfaatkan seluas  $\pm 33.677$  ha. Dengan produksi padi 127.369,48 GKG. Untuk potensi pengembangan lahan kering seluas  $\pm 169.000$  ha, yang belum dimanfaatkan seluas  $\pm 84.648$  ha dan yang telah dimanfaatkan seluas  $\pm 74.136$  ha, dipergunakan untuk pengembangan palawija dengan luas areal  $\pm 13.476$  ha, dengan produksi 1.448 ton dan buah-buahan dengan luas  $\pm 1.247$  ha, dengan produksi 27.958,04 ton, sayur-sayuran dengan luas  $\pm 1.247$  ha, dengan produksi 1.448 ton dan buah-buahan dengan luas  $\pm 5.320,80$  ha, dengan produksi 82.105,38 ton.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Perkebunan

Kebun kelapa identik dengan Indragiri Hilir dan Indragiri Hilir adalah sentra kebun kelapa paling luas di Indonesia, menjadi hamparan kebun kelapa dunia. Di sini pohon-pohon kelapa tumbuh dengan suburnya dari lahan-lahan yang semula hutan rawa-rawa.

Sebagai negara pemilik kebun kelapa terluas di dunia, Indonesia mempunyai perkebunan seluas 3,7 juta hektar yang tersebar di kepulauan kelapa. Wilayah Kateman atau yang lebih di kenal dengan sebagai Sungai Guntung adalah Kecamatan yang memiliki kebun kelapa paling luas disana. Kebun-kebun ini adalah milik PT. Pulau Sambu, sebuah perusahaan agrobisnis yang memiliki kebun sekaligus pabrik minyak kelapa di Indragiri Hilir.

Kebun kelapa di sana dikelola secara profesional. Hamparan kebun itu bukan hanya subur, produktif dan dihandalkan, tetapi juga indah mengasyikan. Kebun Kelapa Guntung sudah menjadi objek wisata atau agrowisata yang luar biasa. Dan inilah kebun kelapa raksasa dan daya tarik wisata yang tiada tara. Kabarnya disekitar pantai akan dibuat badan jalan, sepanjang tepi kanal dan tanggul akan dapat dilalui kendaraan.

Yang kedua adalah perkebunan kelapa sawit, indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia sebagian besar kelapa sawit indonesia berasal dari perkebunan di indragiri hilir, karena semakin murah nya harga kelapa di indragiri hilir petani kelapa di inhil banyak yang beralih menjadi petani kelapa sawit hasilnya inhil sekarang menjadi daerah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkenal dengan kelapa sawitnya. Panjang kanal disambung-sambung akan mencapai 32.000 kilometer.

Selain kelapa sebagai hasil bumi Kabupaten ini, kelapa sawit juga menjadi sumber daya alam terdapat banyak di barat kabupaten ini seperti di Kecamatan Tempuling, Enok, Kempas Jaya dan Teluk Kiambang salah satu desa penghasil sawit terbesar di Kabupaten ini.

#### c. Peternakan

Potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk usaha ternak pada sub sektor peternakan seluas  $\pm 225.863$  ha, dengan daya tampung  $\pm 902.452$  ekor dipergunakan untuk ternak besar (sapi). Adapun jumlah ternak besar saat ini  $\pm 11.678$  ekor dan ternak kecil (kambing dan domba)  $\pm 30.862$  ekor, sedangkan untuk kebutuhan daging di Kabupaten Indragiri Hilir  $\pm 2.995.744$  ton dan kebutuhan telur  $\pm 1.671.054$  kg.

Yang mampu dihasilkan usaha peternakan untuk daging  $\pm 45\%$  dan untuk telur  $\pm 35.31\%$ , maka peluang potensi pengembangan pasar lokal untuk daging dan telur sangat cukup terbuka.

#### d. Perikanan

Program kerjapembangunan perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir telah mengacu pada 4 (empat) usaha pokok, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, serta terus meningkatkan peranan perusahaan swasta dalam dunia perikanan dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan nelayan/petani ikan melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha, memenuhi kebutuhan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen ikan dalam negeri, penyediaan bahan baku industri dan peningkatan ekspor. Disamping itu sekaligus dapat diarahkan untuk pemerataan kesempatan berusaha serta penyerapan tenaga kerja dengan tetap menjaga sumber daya dan lingkungan hidup perairan.

Mengacu kepada tujuan pembangunan perikanan Riau dengan memperhatikan kondisi dan potensi perikanan di daerah ini, maka program kerja pembangunan perikanan Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan serta pengembangan usaha budidaya pertambakan dalam rangka peningkatan pendapatan;
  2. Peningkatan institusi pemasaran dan pemerataan distribusi perikanan untuk mempermudah suplai ikan bagi masyarakat yang bermukim di pedalaman;
  3. Peningkatan ekspor sekaligus menekan impor komoditas perikanan;
  4. Pemanfaatan seefisien mungkin serta pemeliharaan kelestarian sumber daya dan lingkungan perairan; dan
- Meningkatkan peranan sub sektor perikanan dalam kegiatan dan pembangunan pedesaan terutama dalam hal menciptakan peluang bekerja dan berusaha.

Evaluasi pelaksanaan tugas sub sektor perikanan Indragiri Hilir disusun berdasarkan realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Indragiri Hilir serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh nelayan/petani ikan di daerah ini sehingga akan tergambar pencapaian sasaran target berdasarkan yang telah diprogramkan. Luas lahan potensial

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk usaha pengembangan budidaya air payau (tambak) sekitar 13.000 hektar, sedangkan untuk budidaya air tawar (kolam) sekitar 1.657 Ha. Jumlah penduduk yang berusaha di bidang perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung/sambilan.

#### 4. Budaya

Mayoritas penduduk kota Tembilahan berasal dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Namun ada juga beberapa suku lain yang jumlahnya tidak sedikit seperti suku Minang, Bugis, Melayu dan etnis Tionghoa. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa tanah Riau ini mayoritas suku Melayu. Sama halnya dengan Pekanbaru yang juga banyak suku Minang yang berasal dari pendatang Sumatera Barat, suku Banjar dahulunya juga merupakan pendatang dari Kalimantan Selatan. Hal ini karena daerah Tembilahan yang berbentuk rawa dan parit, cocok dengan daerah Banjarmasin yang juga seperti itu.

### B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir

#### 1. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

##### a. Visi

DPM-PTSP dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 yaitu koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

integrasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah di bidang penanaman modal dan promosi daerah, memiliki visi **“Terwujudnya pelayanan perizinan, penanaman modal dan promosi daerah yang handal dan terpercaya”**.

#### b. Misi

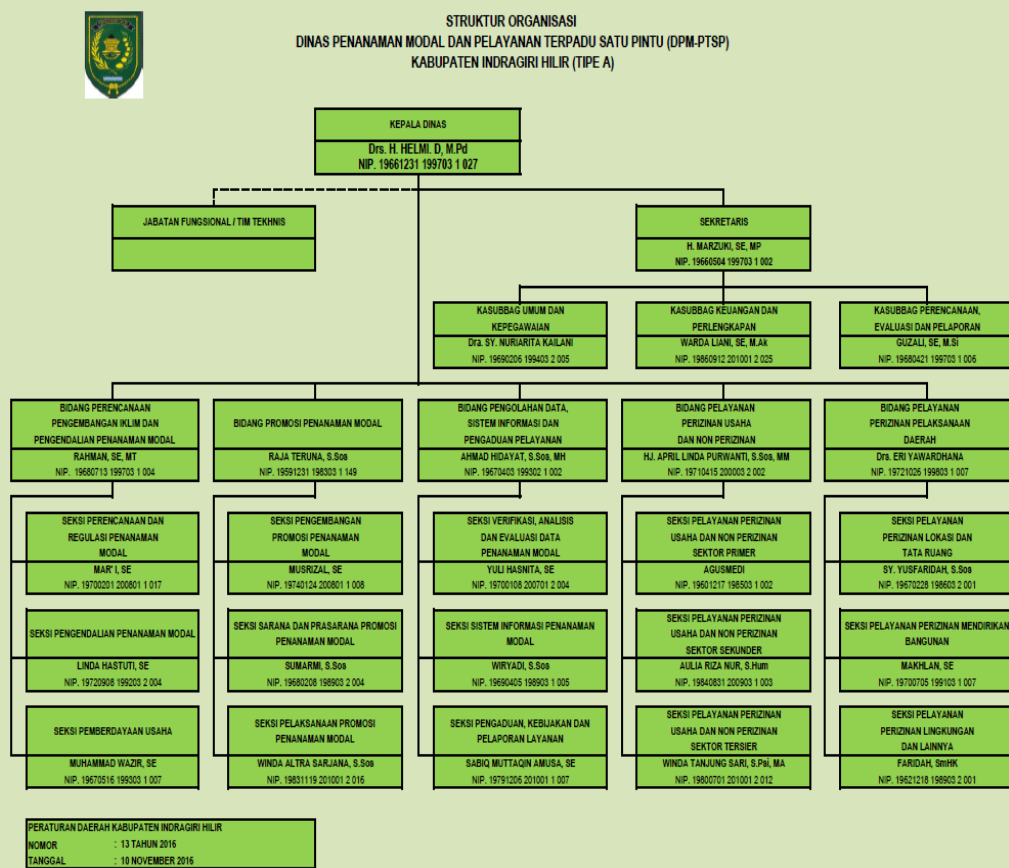
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, DPM-PTSP memiliki misi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan mutu pelayanan perizinan yang cepat, tepat, akurat, terpercaya dan akuntabel;
- b) Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan terpercaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- c) Meningkatkan peran konsultasi, fasilitasi dan mendorong perkembangan sektor produktif bidang penanaman modal.<sup>18</sup>

<sup>18</sup>Wawancara : Helmi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 13 Oktober 2019.



## Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir

1. Hak Cipta
2. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## CV. Rosalia Indah

### 1. Sejarah Berdirinya CV. Rosalia Indah

CV. Rosalia Indah adalah sebuah perusahaan komanditer (CV) yang bergerak dibidang perdagangan. Menekuni bidang perdagangan eceran khusus semen dan besi untuk bahan konstruksi didalam bangunan. Pendiri CV. Rosalia Indah adalah Ibu Eva Rosalina berbagai proses perkembangan dilalui, baik mengenai segi usaha maupun bentuk yuridis usaha yang kegiatan usahanya dimulai pada tanggal 20 Februari 2013.

Pada awal berdirinya, kegiatan usaha CV. Rosalia Indah bersifat *general kontraktor* yaitu dengan banyak usaha yang dijalankan namun lebih di klasifikasikan pada penjualan semen, kawat, aspal dan cat tembok. Berbagai perubahan manajemen senantiasa dilakukan pemilik untuk meningkatkan kinerja perusahaan seperti mulai merekrut pegawai hingga menambah jumlah outlet serta perubahan yuridis usahanya dengan mendaftarkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).<sup>19</sup>

### 2. Visi, Misi, Motto CV. Rosalia Indah

#### a. Visi Perusahaan

- 1) Memperluas peluang usaha;
- 2) Meningkatkan volume penjualan;
- 3) Memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan; dan

<sup>19</sup>Wawancara : Asna Dewi, *Kabid Pemasaran dan Informasi*, tanggal 13 Oktober 2019.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Memiliki manajemen yang solid dan professional

b. Misi Perusahaan

- 1) Membantu menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
- 2) Berusaha memberikan kepuasan kepada pelanggan dan karyawan

c. Motto : **“Anda Puas Kami Senang”**.

### 3. Lokasi Perusahaan

Pemilihan lokasi perusahaan pada dasarnya sangat mempengaruhi dan merupakan persoalan yang harus difikirkan oleh pendiri perusahaan.

Pemilihan letak atau lokasi harus didasari oleh pertimbangan yang tepat dan cermat, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran jalannya proses produksi, serta perkembangan perusahaan dimasa yang akan datang. CV. Rosalia Indah ini berlokasi di Jalan Gunung Daek Nomor 59 RT. 005 RW.013, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

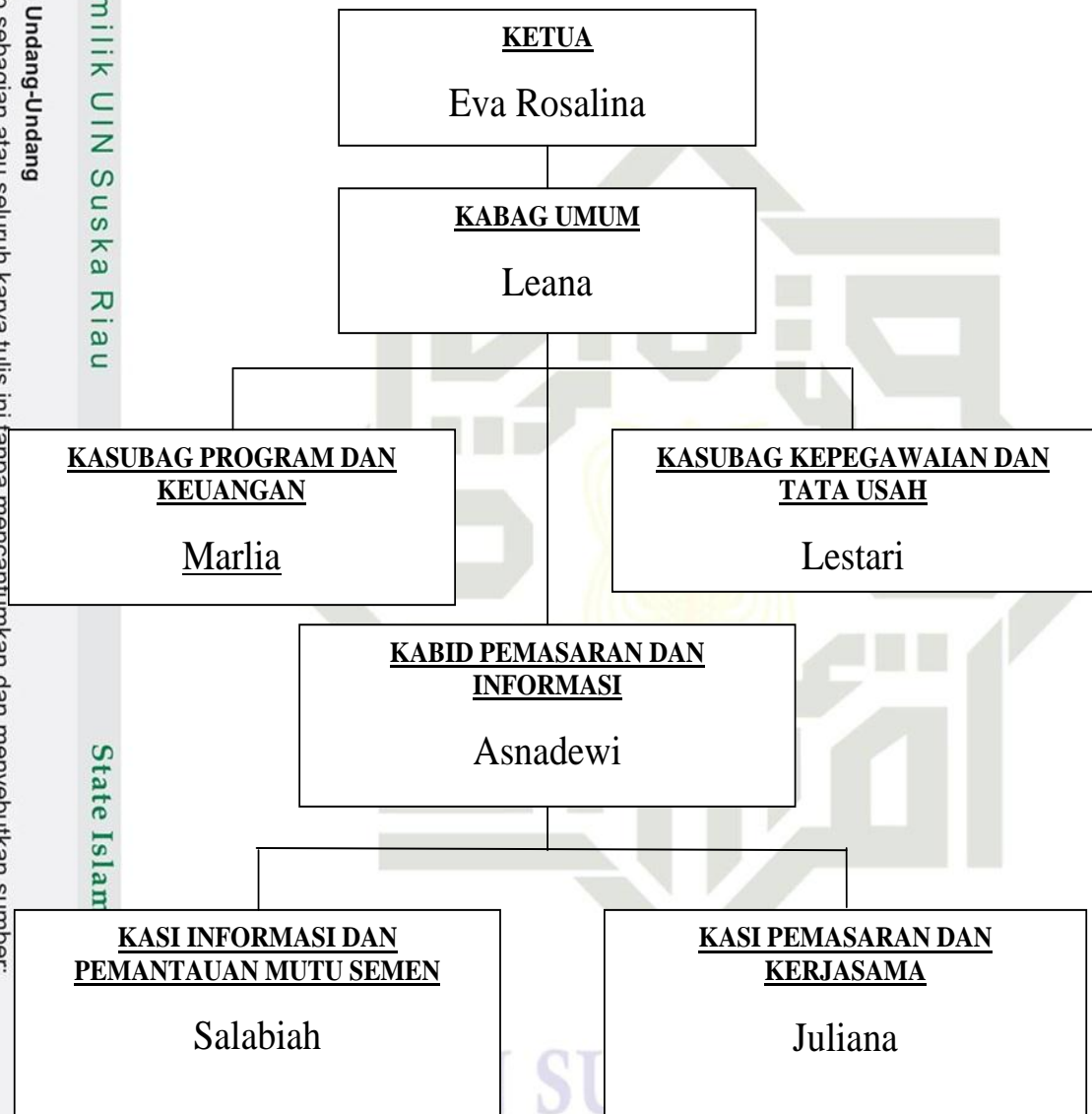
UIN SUSKA RIAU





#### 4 Struktur Organisasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber :CV. ROSALIA INDAH

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN YURIDIS

### A. Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan dan pembebasan dari suatu larangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.<sup>20</sup>

Surat izin usaha perdagangan seperti yang di kenal dengan singkatan SIUP yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang Anda lakukan.<sup>21</sup> Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Surat Izin Usaha Perdagangan tidak hanya di butuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 167-168.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan, pasal 1 ayat (2).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadi masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha di kemudian hari. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya.

Menurut Sri Y. Putyatmiko, pengajuan permohonan izin pada umumnya harus dilakukan secara tertulis, sering kali dengan mengisi formulir tertentu yang sudah disediakan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Adanya formulir pengeluaran izin memudahkan pihak pemohon dalam pengajuan permohonan izin karena yang bersangkutan tidak harus merangkai kalimat sendiri yang berisi permohonan izin.<sup>22</sup> SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggungjawab perusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II atas nama menteri. Sedangkan SIUP perusahaan besar diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama menteri.

Berdasarkan pengertian diatas, kita dapat mengetahui bahwa pemberian izin atau esuatu dalam pemerintahan adalah pejabat uang berwenang dalam hal perizinan seperti pejabat administrasi Negara yang diberikan wewenang dalam pengurusan izin seperti ini. Dan juga yang melakukan kegiatan usaha

<sup>22</sup> Y. Sri Putyatmiko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembeenan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2009, hlm 34.



perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

## Dasar Hukum Surat Izin Usaha Perdagangan

Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib untuk memiliki SIUP. Dalam Pasal 5 ayat 91, Permendag 36/M-DAG/PER/9/2007 yang menyatakan bahwa SIUP tidak bisa digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang tertulis sebagaimana mestinya yang tercantum dalam SIUP. Jadi, jika seorang pengusaha ingin melakukan bisnis yang aman dan diakui secara hukum maka harus segera mengajukan permohonan SIUP.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag 46/2009, terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria:

1. Usaha Perseorangan atau persekutuan;
2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat; dan
3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Namun, Perusahaan Perdagangan Mikro tetap dapat memperoleh SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan tersebut. Permohonan SIUP ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yang cukup

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Lampiran II Permendag 36/2007. SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Mulai awal tahun 2017 SIUP tidak perlu didaftar ulang. Penghapusan pendaftaran ulang SIUP diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017. SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan tidak ada perubahan. SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup. Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.

### C. Jenis-Jenis SIUP

SIUP sendiri dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan modal yang digunakan ketika mendirikan usaha yaitu :

1. SIUP Mikro adalah SIUP yang diberikan kepada perusahaan Perdagangan Mikro dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya namun tidak lebih dari Rp. 50juta;
2. SIUP Kecil berbeda dengan SIUP Mikro, SIUP ini adalah surat izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (neto) seluruhnya sebesar Rp. 50juta sampai dengan Rp. 500juta namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. SIUP Menengah adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih sebesar Rp. 500juta sampai dengan Rp. 10 milyar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

4. SIUP Besar merupakan SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya lebih dari Rp. 10 Milyar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha<sup>23</sup>.

Perusahaan yang memiliki SIUP mempunyai 3 kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Wajib melapor apabila tidk melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup perusahaan disertai dengan pengembalian SIUP, mengenai pembukuan cabang atau perwakilan perusahaan, atau mengenai penghentian kegiatan atau penutupan cabang atau perwakilan perusahaan;
2. Wajib memberikan data atau informasi mengenai kegiatan usaha apabila diperlukan oleh menteri atau pejabat yang berwenang; dan
3. Wajib membayar uang jaminan dan biaya administrasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>24</sup>

Beberapa perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki SIUP yaitu :

<sup>23</sup> Richard Burton Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Rinneka Cipta, Jakarta. 2003. hlm. 143.

<sup>24</sup> Richard Burton Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Rinneka Cipta, Jakarta. 2003. hlm. 15.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Cabang atau perwakilan perusahaan yang menjalankan kegiatan perdagangan mempergunakan SIUP kantor pusat perusahaan;
- b. Perusahaan yang mendapat izin usaha dari departemen teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan perdagangan;
- c. Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
- d. Perusahaan jawatan dan perusahaan umum; dan
- e. Perusahaan kecil perorangan.<sup>25</sup>

#### D. Manfaat dan fungsi SIUP

SIUP sebagai alat pemerintah untuk mendata badan usaha perdagangan, juga memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Sebagai perijinan resmi dari pemerintah bagi badan usaha perdagangan

Dengan adanya perizinan resmi dari pemerintah, artinya usaha Anda memiliki perlindungan hukum yang kuat. Sehingga Anda bisa selamat dari penertiban usaha liar atau jika ada kasus hukum yang menyangkut legalitas usaha Anda, Anda sudah punya pegangan legalnya;

2. Syarat utama dalam kegiatan yang menunjang usaha

Jika Anda hendak mengajukan pinjaman modal usaha ke bank, Anda membutuhkan SIUP sebagai salah satu syaratnya. Pun jika Anda hendak mengikuti lelang atau tender, maka SIUP menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi;

<sup>25</sup> Ibid. hlm. 150.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menunjang usaha jika ingin melakukan perdagangan internasional SIUP merupakan sarana untuk mendukung kegiatan ekspor-impor yang hendak dilakukan oleh badan usaha; dan
6. Meningkatkan kredibilitas

Jika usaha Anda tidak memiliki izin, maka kredibilitas badan usaha akan diragukan oleh pasar. Anda juga bisa mengikuti pameran yang diadakan oleh instansi pemerintah untuk mempromosikan usaha Anda.

### E. Syarat-syarat membuat SIUP

Syarat-syarat membuat SIUP adalah menyiapkan dokumen-dokumen sebagai syarat administrasi. Persyaratan pembuat SIUP ini dibedakan berdasarkan jenis atau bentuk usaha yang Anda jalankan. Berikut ini cara membuat SIUP:

#### 1. Cara Membuat SIUP untuk PT (Perseroan Terbatas)

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan atau pemegang sahamnya;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) jika penanggung jawabnya seorang perempuan;
- c. Fotokopi NPWP;
- d. Surat Keterangan Domisili atau SITU;
- e. Fotokopi Akta Pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- f. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Surat Izin Gangguan (Ho);

h. Izin Prinsip;

i. Neraca Perusahaan;

j. Pas Foto Direktur Utama/Penangguna Jawab/Pemilik perusahaan dengan ukuran 4×6 (2 lembar);

k. Materai 6000; dan

l. Izin teknis dari instansi terkait jika diminta<sup>26</sup>.

## 2. Cara Membuat SIUP untuk Koperasi

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi;

b. Fotokopi NPWP;

c. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan instansi berwenang;

d. Daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas;

e. Fotokopi SITU dari Pemerintah Daerah (Pemda);

f. Neraca Koperasi;

g. Materai senilai Rp6000;

h. Pas foto Direktur Utama/Penangguna Jawab/Pemilik Perusahaan dengan ukuran 4×6 (2lembar); dan

i. Izin lain yang terkait seperti izin Amdal dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan daerah jika ternyata usaha Anda akan menghasilkan limbah<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> Hermawan Sasongko, *Buku Sakti Mengurus Dokumen Perizinan Dalam Bisnis*, Araska, Yogyakarta, 2014. hlm. 53.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pengurusan SIUP Untuk Perseroan Terbuka (Tbk)

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab/Pemilik Perusahaan;
- b. Fotokopi SIUP Sebelum menjadi Perseroan Terbuka;
- c. Fotokopi Akta Notaris Pendirian dan Perubahan Perusahaan dan Surat Persetujuan Status Perseroan Tertutup Menjadi Perseroan Terbuka dari Departemen Hukum dan HAM;
- d. Surat Keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka;
- e. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP LKTP) tahun buku terakhir; dan
- f. Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/Pemilik Perusahaan dengan ukuran 4×6 cm (2 lembar)<sup>28</sup>.

Jika ternyata tempat kegiatan usaha bukan milik sendiri maka harus dilengkapi dengan surat izin pemilik sebagai bukti ketidakberatan penggunaan tanah atau bangunan yang dimaksud. Surat izin ini ditandatangani di atas materai cukup sebagai bukti perjanjian sewa menyewa antara pemilik tempat dan pelaku usaha.

### 4. Cara Membuat SIUP Perorangan

Berbeda dengan di atas yang membuat SIUP untuk badan usaha kali diajarkan bagaimana cara membuat SIUP Perorangan yaitu:

<sup>27</sup> Ibid., hlm.53.

<sup>28</sup> Ibid., hlm.54.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Fotokopi KTP pemilik/ penanggung jawab perusahaan;
- b. Fotokopi NPWP perusahaan;
- c. Fotokopi surat izin tempat usaha (SITU) dari pemerintah daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang gangguan (HO); dan
- d. Neraca Perusahaan.<sup>29</sup>

### F. Prosedur Pengurusan SIUP

Prosedur ini tentunya bisa diurus jika dokumen-dokumen yang diperlukan sudah lengkap. Berikut prosedurnya<sup>30</sup>

#### 1. Mengambil formulir pendaftaran/surat permohonan di Kantor Dinas Perdagangan

Anda bisa mengambil formulir pendaftaran langsung ke kantor Dinas Perdagangan atau Kantor Pelayanan Perizinan Setempat. Namun jika Anda sibuk maka bisa menyuruh orang lain yang sudah Anda beri kuasa.

#### 2. Formulir Pendaftaran atau Surat Permohonan di Kantor Dinas Perdagangan

Formulir pendaftaran atau surat permohonan sudah disediakan oleh kantor Dinas Perdagangan. Dan diperintahkan untuk mengisinya secara lengkap dan benar. Setelah itu ditandatangani di atas materai 6000 oleh pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan. Formulir yang sudah diisi lengkap kemudian akan difotokopi sebanyak dua rangkap dan

<sup>29</sup>Ibid., hlm.53.

<sup>30</sup>Ibid., hlm.12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digabung dengan berkas persyaratan administrasi yang sudah diuraikan di atas.

Namun apabila Anda berikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus pembuatan SIUP maka wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan cukup ditanda tangani oleh pemilik/ Direktur Utama/ Penanggung Jawab perusahaan.

### 3. Membayar Tarif Pembuatan SIUP

Umumnya biaya untuk pembuatan SIUP berbeda-beda pada setiap daerah tergantung dari peraturan yang diatur oleh Peraturan Daerah di masing-masing wilayah.

### 4. Pengambilan SIUP

Setelah SIUP dibuat biasanya akan jadi sekitar dua minggu. Biasanya jika SIUP Anda sudah jadi maka Anda akan dihubungi oleh petugas dan Anda bisa datang ke kantor tempat Anda mengurus SIUP untuk mengambilnya.

### G. Sanksi

Berdasarkan Pasal 13 huruf a dan b dan Pasal 14 Kepmendag Nomor 1458/KEP/XII/84 dan butir 2 angka 1 SE Ditgen Dagri Nomor 615/Binus-3/VII/86 Perusahaan diberikan peringatan tertulis apabila :

- a. Tidak melakukan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, 9 dan 10 keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kep/XII/1984.
- b. Tidak memenuhi kewajiban pajak pada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang berwenang yang melakukan peringatan tertulis adalah Kepala Kawil Depdag atau kepala kantor Depdag yang menerbitkan SIUP.<sup>31</sup> SIUP dapat dibekukan dapat dibekukan dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Sedang diperiksa disidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, yang didasarkan bukti adanya pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pengadilan.
- b. Telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dari pejabat yang berwenang penerbitan SIUP karena melanggar :
  - a) Tidak melaporkan mengenai penghentian kegiatan usahanya/penutupan perusahaannya, termasuk kantor cabang/perwakilan perusahaan;
  - b) Tidak melaporkan pembukuan kantor cabang/perwakilan perusahaan;
  - c) Tidak memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan berlaku; dan
  - d) Tidak memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas permintaan tertulis dari kantor pelayanan pajak setempat.

Jangka waktu SIUP selama-lamanya 1 tahun, kecuali masih dalam proses pemeriksaan badan peradilan.<sup>32</sup> SIUP yang telah dibekukan dapat dicairkan apabila :

<sup>31</sup> Thomas Subroto. *Panduan Membuka Perusahaan Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan*. Dahara Prize, Semarang, 1995. hlm. 114.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 116.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai keputusan badan perdilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- b) Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan teguran dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

SIUP dicabut apabila perusahaan pemegangnya :

- a) Telah di jatuhi hukuman oleh badan peradilan yang mempuyai kekuatan hukum tetap; dan
- b) Tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan.

Yang dimaksud dengan tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan adalah :

- a) Tidak memenuhi lagi persyaratan untuk memperoleh SIUP;
- b) Menyalahgunakan SIUP yang menyimpang dari badan usaha dan jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP nya; dan
- c) Melanggar larangan dibidang perdaganagan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan yang telah dicabut SIUP nya dapat mengajukan permohonan untuk untuk memperoleh SIUP baru setelah 1 tahun sejak tanggal pencabutan apabila disetujui permohonannya tersebut, diperlakukan sebagai perusahaan baru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir, dan di CV. Rosalia Indah di Kota Tembilahan dalam kajian terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada CV. Rosalia Indah Di Tembilahan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri telah mengimplementasikan pasal tersebut di atas dengan cukup baik melalui Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir serta dibantu oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir. Kedua lembaga Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Tembilahan serta dibantu oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi di Kabupaten Indragiri Hilir saling berkerjasama dalam pelaksanaan pemberian izin dan penyuluhan serta pengarahan kepada Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir tentang pentingnya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi pengusaha perdagangan di Kabupaten Indragiri Hilir termasuk terhadap CV. Rosalia Indah di Tembilahan.
2. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pimpinan CV. Rosalia Indah, Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri Hilir telah memberikan surat peringatan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh CV. Rosalia Indah, dan CV. Rosalia Indah akan segera menutup usaha Furniture yang mereka jalankan agar SIUP perusahaan mereka tidak dicabut oleh Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir.

### **Saran**

Berdasarkan masalah yang ada, dan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut penulis mengajukan beberapa saran atau rekomendasi untuk permasalahan yang ada, diantaranya:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terkhusus untuk kota Tembilahan dan Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Tembilahan serta Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi di Kabupaten Indragiri Hilir untuk selalu saling berkerjasama dalam setiap tugas yang diberikan termasuk terhadap pelaksanaan pemberian izin dan penyuluhan serta pengarahan kepada Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir agar tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera terutama dalam sektor perekonomian.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat dan kepada setiap pengusaha yang berada di lingkup Kabupaten Indragiri Hilir untuk tunduk dan patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan demi terciptanya ketertiban keamanan dan kenyamanan dalam setiap segi kehidupan terutama di bidang perekonomian.



## DAFTAR PUSTAKA

- DAFTAR PUSTAKA**

Adrian Sutedi (2010), *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika

Amiruddin (2014), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Rajawali Pers

Burhan Ashshofa (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Farida Hasyim (2013), *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika

Hermawan Sasongko (2014), *Buku Sakti Mengurus Dokumen Perizinan Dalam Bisnis*, Yogyakarta : Araska

Lexy J. Moleong, (2003), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja rosdakarya

Nurul Zuriah (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya

Rachmadi Usman (2004), *Dimensi Hukum dan Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung : P.T. ALUMNI

Richard Burton Simatupang(2003), *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta : Rinneka Cipta

R. Subekti (1977). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni

R. Sukardono (1981). *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian kedua)*. Jakarta: Rajawali

Sembiring Sentosa (2015) *Hukum Dagang*, Bandung: PT. citraaditya Bakti

Soerjono Soekanto (1983), *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rinneka Cipta

Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung: AlfaBeta



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sembiring, Sentosa (2015) *Hukum Dagang*, Bandung:PT.citraaditya Bakti

Thomas Subroto (1995) *Panduan Membuka Perusahaan Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan*, Semarang : Dahara Prize

Y. Sri Putyatmiko (2009), *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

Zeni Asyhadie (2017) *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9 .Tentang penerbitan Izin Usaha( Jakarta, 2009)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

## WEBSITE

<https://media.neliti.com/media/publications/75037-ID-kefektifan-pemberlakuan-surat-ijin-usaha>

<https://eprints.uns.ac.id/6366/1/Unlock-190851611201103501.pdf>,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
PERDAGANGAN NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENERBITAN  
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN PADA CV. ROSALIA INDAH DI  
TEMBILAHAN**, yang ditulis oleh :

Nama : **R. Hermawan**  
NIM : 11427103798  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 06 Januari 2020  
Waktu : 08.00 Wib  
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

Sekretaris  
**Hellen Last Fitriani, SH., MH**

Penguji I  
**Nur Hidayat, SH., MH**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

 **Jalinus, S. Ag**  
NIP. 19750801 200701023





# JURNAL HUKUM ISLAM

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

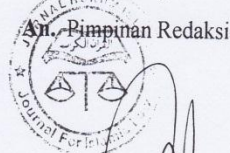
Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **R. HERMAWAN**  
NIM : **11427103798**  
Jurusan : **ILMU HUKUM**  
Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN PADA CV. ROSALIA INDAH DI TEMBILAHAN**

Pembimbing : **Muslim, S.Ag, SH, M.HUM**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Januari 2020



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/26610  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8123/2019 Tanggal 10 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

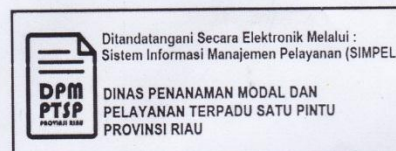
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | R. HERMAWAN   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11427103798   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN IZIN USAHA PERDAGANGAN PADA CV. ROSALIA DI TEMBILAHAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. CV. ROSALIA DI TEMBILAHAN<br>2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR                     |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 Oktober 2019



#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Lh. Kahan Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383  
Tembilahan Kode Pos 29211

**REKOMENDASI PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/302

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/26610 Tanggal 11 Oktober 2019, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **R. HERMAWAN**  
NIM : 11427103798  
Program studi/Jenjang : Ilmu Hukum / SI  
Alamat : Dusun Pasar Baru Kec. Gaung  
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN IZIN  
USAHA PERDAGANGAN PADA CV. ROSALIA DI  
TEMBILAHAN**  
Lokasi Penelitian : **1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
2. CV. ROSALIA TEMBILAHAN**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 21 Oktober s/d 21 Januari 2019.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 21 Oktober 2019

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Sekretaris,  
  
**MARLIS SYARIF, S. Sos, MH**  
Pembina (k. I)  
NIP. 19640310 198703 1 008

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;**  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RI CV. ROSSALIA INDAH**  
Jl. GUNUNG DAEK NO. 59 TEMBILAHAN  
GENERAL CONTRACTOR - SUPPLIER - LEVERANSIR

Tembilahan, 27 Oktober 2019

Kepada Yth,

Dosen Pembimbing

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Di -

Pekanbaru

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat no.Un.04/F.I/PP.00.9/8123/2019,yang mana kami atas nama CV.Rosalia Indah siap membantu untuk kelancaran penelitian untuk bahan skripsi mahasiswa dari fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau atas nama

Nama : R Hermawan

No Mahasiswa : 11427103798

Fak/Jurusan : Ilmu Hukum S1

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang  
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada CV.ROSALIA INDAH  
Tembilahan

Demikianlah surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

CV.Rosalia Indah  
  
EVA ROSA LINA





## BIOGRAFI PRNULIS

**R. Hermawan**, lahir di Teluk Pinang. Merupakan putra dari Ayahanda Raja Ahmad dan Ibunda Masitah. Penulis merupakan putra pertama dari dua bersaudara. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yakni dimulai pada tahun 2002 di SD Negeri 013 Dusun Pisang kemudian lulus pada tahun 2008. Lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Simpang Gaung dan lulus pada tahun 2011, yang kemudian melanjutkan kembali pendidikan nya ke jenjang SMA yakni di SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu dan mengambil jurusan IPS, hingga lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan studi nya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Jurusan Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Bisnis) pada Fakultas Syarif Kasim dan Hukum. Penulis semasa kuliah pernah magang di Pengadilan Agama selama 2 bulan. Penulis juga memiliki bakat dan minat di bidang karya seni terapan melukis. Selanjutnya, penulis menyelesaikan studi S1 (Strata 1) pada jurusan Hukum pada Tahun 2019.

- Hak Cipta Dili**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.